

Praktik Akuntansi Pemerintahan di Indonesia: Persamaan, Teknik Penjurnalan, dan Tantangan Transaksi

Bahrul Walidin^{1,*}, Shahibul Bayani², A'qilla Fadia Haya³, Muammar Khaddafi⁴

^{1 2 3 4}Program Magister Akuntansi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe,
bahrunpdn@gmail.com, shahibulbayani@gmail.com, aqilla.246210101013@mhs.unimal.ac.id,
khaddafi@unimal.ac.id,

* Korespondensi: e-mail: shahibulbayani@gmail.com

Diterima: 16 Mei 2025; Review: 20 Mei 2025; Disetujui: 4 Juni 2025

Cara sitasi: Walidin B, Bayani S, Haya AFH, Khaddafi M. 2025. Praktik Akuntansi Pemerintahan di Indonesia: Persamaan, Teknik Penjurnalan, dan Tantangan Transaksi. *Jurnal Online Insan Akuntan*. 10 (1): 78 - 89.

Abstrak: Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis praktik akuntansi pemerintahan di Indonesia dengan fokus pada penerapan persamaan akuntansi, teknik penjurnalan, serta tantangan transaksi dalam lingkungan sektor publik. Menggunakan metode systematic literature review, penulisan ini mengkaji berbagai studi nasional yang relevan selama lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka standar akuntansi pemerintahan telah ditetapkan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan pemahaman teknis penjurnalan, kesenjangan infrastruktur teknologi informasi, serta perbedaan interpretasi terhadap standar akuntansi yang berlaku. Lebih lanjut, penulisan ini menyoroti pentingnya peran teknologi informasi sebagai solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan pencatatan transaksi, sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah. Diperlukan sinergi antara peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan sistem informasi akuntansi yang memadai agar tujuan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat tercapai secara optimal.

Kata kunci: Akuntansi Pemerintahan, Penjurnalan Transaksi, Teknologi Informasi

Abstract: This paper aims to analyze government accounting practices in Indonesia, focusing on the application of accounting equations, journalizing techniques, and the challenges faced in managing public sector transactions. Using a systematic literature review approach, this study synthesizes various national literature and government policy documents published between 2019 and 2024. The analysis reveals that inconsistencies in journalizing, lack of competent human resources, and the complexity of non-routine transactions are the main challenges in government accounting implementation. Furthermore, differences in interpreting government accounting standards often lead to discrepancies in financial reporting. This paper also highlights the role of information technology as a strategic solution to enhance efficiency, accuracy, and transparency in governmental financial management. The findings are expected to provide insights and recommendations for policymakers and practitioners in improving the quality and accountability of government accounting practices in Indonesia..

Keywords: Government Accounting, Journalizing Techniques, Transaction Challenges

1. Pendahuluan

Dalam era digital yang terus berkembang pesat, perlindungan data pribadi menjadi isu yang sangat penting dan mendesak untuk diperhatikan oleh seluruh lapisan

masyarakat. Transformasi teknologi yang begitu cepat telah membawa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pengelolaan informasi dan komunikasi. Namun, kemudahan tersebut juga membawa risiko besar terhadap keamanan dan privasi data pribadi pengguna. Kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi masih belum merata dan cenderung rendah, sehingga rawan terjadi pelanggaran data yang dapat merugikan individu maupun institusi (Putra dkk., 2020). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kesadaran ini terbentuk dan apa saja faktor yang mempengaruhinya dalam konteks era digital (Anggen Suari & Sarjana, 2023).

Penulisan mengenai kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi telah menjadi perhatian utama di berbagai bidang, baik dalam kajian akademik maupun kebijakan publik. Menurut Putra et al. (2023), tingkat kesadaran yang tinggi akan mendorong individu untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi dan membatasi informasi yang dibagikan secara online. Namun, masih terdapat kesenjangan informasi dan edukasi yang perlu diatasi agar perlindungan data pribadi dapat berjalan efektif (Saputra, 2023). Kesadaran ini tidak hanya bergantung pada faktor individual, tetapi juga didukung oleh sistem informasi dan kebijakan yang ada di suatu negara maupun organisasi (Hadiyat, 2020).

Selain itu, di ranah pemerintahan desa, peran teknologi informasi juga semakin vital dalam mendukung kinerja aparatur pemerintah desa. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) sebagai salah satu komponen teknologi informasi memiliki peranan strategis dalam meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi pengelolaan keuangan desa (Welly dkk., 2023).

Namun, keberhasilan implementasi SIA sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikannya (Animah dkk., 2020). Kualitas sumber daya manusia yang baik akan mampu mengoptimalkan fungsi SIA sehingga berdampak positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa (Nugrahanti dkk., 2023). Dalam konteks tersebut, Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara sebagai daerah dengan 24 desa memiliki tantangan tersendiri dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman terhadap sistem informasi yang digunakan, keterbatasan sumber daya manusia yang

terampil, serta hambatan dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel (Syachbrani, 2024). Oleh sebab itu, penulisan yang mengkaji pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja aparatur pemerintah desa menjadi sangat relevan untuk memberikan gambaran dan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa (Hairul Izam, 2024).

Di sisi lain, dalam praktik pemerintahan yang lebih luas, terdapat berbagai permasalahan terkait praktik akuntansi pemerintahan di Indonesia yang masih dihadapkan pada kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan. Meskipun standar akuntansi pemerintahan nasional telah disusun untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, penerapan teknis penjurnalan dan pengakuan transaksi masih menjadi tantangan yang signifikan (Akbar, 2018). Sering kali terdapat perbedaan interpretasi terhadap standar, yang menyebabkan inkonsistensi dalam pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah maupun pusat (W., 2009). Masalah ini semakin kompleks ketika menyangkut transaksi yang bersifat non-rutin dan transaksi yang memerlukan estimasi serta penilaian subjektif, seperti aset tetap dan kewajiban kontinjensi (Halim & Wibowo, 2022).

Masalah lain yang juga menjadi perhatian adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang akuntansi pemerintahan. Banyak aparat pemerintah yang belum sepenuhnya memahami teknik penjurnalan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Hal ini berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Selain itu, proses digitalisasi yang sedang berjalan juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam hal integrasi sistem dan keamanan data (Asri Putri & Herning Sitabuana, 2022).

Beberapa penulisan sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek terkait praktik akuntansi pemerintahan di Indonesia. Misalnya, studi oleh Harahap dan Prabowo (2023) menyoroti kendala teknis dalam penjurnalan transaksi pemerintah daerah dan memberikan rekomendasi terkait peningkatan kapasitas aparatur serta penyempurnaan sistem informasi akuntansi (Harahap & Prabowo, 2023). Penulisan lain oleh Rahmawati et al. (2020) membahas kesenjangan antara teori akuntansi pemerintahan dan praktik di

lapangan, terutama dalam hal pelaporan keuangan dan penerapan standar akuntansi berbasis akrual (Rahmawati dkk., 2022). Sementara itu, (Mahmudah & Ls, 2017) menekankan pentingnya peran teknologi informasi dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas akuntansi pemerintah, khususnya dalam menghadapi kompleksitas transaksi yang semakin meningkat. Selain itu, Fadillah (2019) mengemukakan bagaimana kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi Sistem Informasi Akuntansi di tingkat desa yang berdampak pada kinerja aparatur pemerintah.

Namun demikian, meskipun sejumlah penulisan telah dilakukan, masih terdapat gap penulisan yang cukup signifikan, khususnya dalam hal pemahaman praktik penjurnalan yang tepat dan konsisten dalam konteks transaksi pemerintahan yang semakin kompleks dan beragam. Banyak penulisan terdahulu lebih fokus pada aspek pelaporan keuangan secara umum tanpa meneliti secara mendalam teknik penjurnalan serta tantangan yang dihadapi dalam transaksi pemerintahan yang spesifik, seperti transaksi berbasis hibah, subsidi, atau aset tetap. Selain itu, sebagian besar penulisan juga belum mengintegrasikan analisis terhadap peran teknologi informasi sebagai alat pendukung praktik akuntansi pemerintah dalam memperbaiki kesalahan penjurnalan dan meningkatkan efisiensi.

Penulisan ini terletak pada fokusnya yang lebih komprehensif terhadap praktik penjurnalan dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia, menggabungkan analisis persamaan akuntansi, teknik penjurnalan, dan tantangan transaksi yang khas dalam lingkungan pemerintahan, sekaligus mengevaluasi peran teknologi informasi sebagai solusi inovatif yang mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur akuntansi pemerintahan dengan pendekatan yang aplikatif dan relevan untuk kondisi Indonesia saat ini, sehingga mampu menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, praktisi, serta akademisi dalam mengoptimalkan praktik akuntansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Tujuan utama penulisan ini adalah untuk menganalisis praktik akuntansi pemerintahan di Indonesia dengan fokus pada kesamaan dan variasi dalam penerapan persamaan akuntansi, teknik penjurnalan yang digunakan, serta mengidentifikasi

berbagai tantangan yang muncul dalam pencatatan transaksi pemerintahan. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana teknologi informasi dapat menjadi solusi strategis dalam mengatasi masalah yang muncul serta mendukung akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan kualitas praktik akuntansi pemerintahan dan penguatan tata kelola keuangan negara.

1. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan pendekatan **systematic literature review** untuk mengumpulkan, mengkaji, dan mensintesis berbagai literatur yang relevan mengenai praktik akuntansi pemerintahan di Indonesia, khususnya terkait dengan teknik penjurnalan, persamaan akuntansi, dan tantangan transaksi pemerintahan. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif berdasarkan hasil studi terdahulu dan dokumen resmi yang sudah ada (Rachmawati, 2020)

Proses pengumpulan data literatur dilakukan secara sistematis melalui pencarian di beberapa portal jurnal nasional terkemuka seperti Garuda, Neliti, dan Google Scholar. Penulis menggunakan kata kunci seperti "akuntansi pemerintahan", "penjurnalan transaksi pemerintahan", "teknik akuntansi sektor publik", dan "teknologi informasi akuntansi pemerintah". Kriteria inklusi yang diterapkan adalah literatur yang diterbitkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019–2024), bersifat peer-reviewed, dan mengangkat isu terkait praktik akuntansi pemerintahan di Indonesia (Silalahi & Maullang, 2023).

Sebagai bahan utama penulisan, penulis menggunakan artikel jurnal dan buku yang relevan serta dokumen kebijakan terkait standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) (Waruwu, 2024).

Dalam tahap analisis, literatur yang sudah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik content analysis dengan melakukan identifikasi dan pengelompokan tema utama terkait teknik penjurnalan, persamaan akuntansi, serta tantangan yang dihadapi dalam transaksi pemerintahan. Analisis ini bertujuan untuk

menemukan gap penulisan sekaligus menyajikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan praktik akuntansi pemerintahan dan peran teknologi informasi dalam mendukung efektivitasnya (Abidin & Ramadhan, 2019).

Dengan pendekatan ini, penulisan diharapkan dapat menghasilkan sintesis yang aplikatif, sekaligus memberikan dasar kuat untuk pengembangan praktik akuntansi pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan dinamika lingkungan pemerintahan saat ini.

2. Hasil dan Pembahasan

Hasil dari kajian sistematis terhadap berbagai literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa praktik akuntansi pemerintahan di Indonesia menghadirkan dinamika yang kompleks, khususnya dalam hal penerapan persamaan akuntansi, teknik penjurnalan transaksi, dan tantangan dalam pencatatan transaksi pemerintahan. Berdasarkan studi-studi yang dikaji, terdapat pola kesamaan maupun perbedaan praktik di lapangan yang dipengaruhi oleh beragam faktor, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, hingga kendala interpretasi terhadap standar akuntansi pemerintahan.

Dalam hal penerapan persamaan akuntansi, sebagian besar entitas pemerintahan telah mengadopsi standar akuntansi berbasis akrual sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Persamaan akuntansi yang digunakan yaitu: $\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas Dana}$. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pemerintah daerah sepenuhnya memahami ataupun mampu menerapkan prinsip ini dengan konsisten. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan aparatur pemerintah yang tidak selalu berasal dari bidang akuntansi serta kurangnya pelatihan teknis yang mendalam (Mahmudah & Ls, 2017). Meskipun kerangka dasar akuntansi pemerintahan telah tersedia secara formal, penerapannya sering kali bersifat tekstual dan belum kontekstual dengan kebutuhan dan kapasitas lokal masing-masing daerah.

Teknik penjurnalan yang digunakan dalam akuntansi pemerintahan menunjukkan beragam pendekatan, bergantung pada pemahaman aparat terhadap transaksi dan ketersediaan sistem informasi akuntansi yang memadai. Sebagai contoh,

penjurnalan untuk transaksi belanja barang dan jasa sering kali tidak sesuai dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan. Hal ini tampak dari kajian Harahap dan Prabowo (2023) yang menemukan bahwa lebih dari 40% transaksi pada beberapa pemerintah daerah dicatat tanpa justifikasi yang tepat terhadap akun yang digunakan, yang kemudian berimplikasi pada kesalahan klasifikasi laporan keuangan.

Kesalahan penjurnalan juga banyak ditemukan pada transaksi non-rutin, seperti hibah, belanja modal, atau penyerahan aset. Studi oleh Rahmawati et al. (2020) menunjukkan bahwa ketidaksesuaian teknik pencatatan banyak ditemukan pada transaksi hibah, di mana entitas belum mampu membedakan perlakuan akuntansi antara hibah yang diterima dalam bentuk uang dan barang, yang pada dasarnya memiliki pengakuan dan pengukuran yang berbeda. Permasalahan ini mengindikasikan masih lemahnya pemahaman terhadap dasar-dasar pengakuan transaksi berbasis akrual dan belum optimalnya pelatihan teknis yang diberikan kepada aparatur pemerintah.

Tantangan lain yang menjadi fokus dalam hasil kajian literatur adalah ketimpangan antara regulasi yang ada dengan kondisi di lapangan. Meskipun SAP telah mengatur secara rinci berbagai jenis transaksi pemerintahan, dalam praktiknya, pemahaman terhadap standar tersebut masih bersifat normatif dan belum operasional. Sebagai contoh, pencatatan aset tetap masih sering kali menimbulkan persoalan, terutama terkait estimasi umur manfaat dan nilai residu, serta metode depresiasi yang digunakan (Halim & Wibowo, 2022). Banyak pemerintah daerah yang tidak melakukan inventarisasi dan penilaian aset secara berkala, sehingga pencatatan aset tetap menjadi tidak akurat dan tidak mencerminkan kondisi riil.

Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi tema utama dalam berbagai literatur yang dikaji. Studi Fadillah (2019) menegaskan bahwa kurangnya tenaga akuntansi profesional di desa menjadi penyebab utama tidak optimalnya implementasi sistem akuntansi pemerintahan. Di tingkat desa, aparat yang mengelola keuangan sering kali tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, dan minim pelatihan teknis mengenai tata cara pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan temuan dari Nugrahanti et al. (2023) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan implementasi sistem informasi akuntansi di lingkungan pemerintah desa. Ketika aparatur memiliki pemahaman dan

keterampilan teknis yang memadai, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pun akan meningkat, mencerminkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

Dalam hal teknologi informasi, literatur menunjukkan bahwa peran teknologi sangat strategis dalam mendukung praktik akuntansi pemerintahan yang lebih efisien dan akurat. Sistem informasi akuntansi (SIA) yang terintegrasi memungkinkan pencatatan transaksi secara real-time, validasi data secara otomatis, serta meminimalkan potensi kesalahan manusia dalam penjurnalan (Welly dkk., 2023). Akan tetapi, banyak daerah belum sepenuhnya mengadopsi sistem ini secara optimal. Hambatan utama terletak pada keterbatasan anggaran untuk pengembangan sistem, resistensi pengguna terhadap perubahan, serta lemahnya infrastruktur digital, terutama di daerah terpencil.

Asri Putri dan Sitabuana (2022) dalam studinya menyoroti bahwa meskipun proses digitalisasi sudah mulai dijalankan, tantangan dalam integrasi sistem antar lembaga serta isu keamanan data masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Banyak sistem informasi keuangan daerah yang belum saling terhubung secara harmonis, sehingga menimbulkan inkonsistensi data dan menyulitkan proses pelaporan ke tingkat pusat. Belum lagi ancaman terhadap kebocoran data keuangan pemerintah yang berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan negara.

Hasil temuan dari literatur juga menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk peningkatan kapasitas dan literasi digital bagi seluruh aparatur yang terlibat dalam proses akuntansi pemerintahan. Pelatihan yang berkelanjutan, pendampingan teknis, serta peningkatan mutu pendidikan akuntansi sektor publik menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan ini. Dalam hal ini, kontribusi akademisi dan lembaga pelatihan sangat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik yang selama ini masih cukup lebar.

Beberapa literatur juga menunjukkan adanya praktik baik (*best practice*) di beberapa pemerintah daerah yang mampu memanfaatkan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas secara optimal. Misalnya, pemerintah daerah yang secara aktif bekerja sama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi sistem informasi keuangan daerah (SIKD) telah berhasil meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK secara konsisten. Hal ini membuktikan bahwa tantangan dalam praktik akuntansi

pemerintahan bukanlah hal yang tidak dapat diatasi, melainkan membutuhkan sinergi antara komitmen politik, investasi teknologi, serta penguatan kapasitas aparatur.

Namun demikian, masih terdapat gap penelitian yang cukup besar terkait praktik penjurnalan spesifik dalam transaksi pemerintahan yang lebih kompleks. Mayoritas literatur masih bersifat umum dan belum menggali secara mendalam teknik pencatatan untuk transaksi seperti penghapusan piutang, pengelolaan belanja tidak terduga, atau perlakuan akuntansi atas dana transfer antar entitas pemerintah. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji peran artificial intelligence dan big data dalam membantu pengambilan keputusan akuntansi pemerintah, yang sebetulnya mulai diterapkan di negara lain. Potensi integrasi teknologi ini dalam konteks Indonesia masih menjadi ruang terbuka bagi penelitian selanjutnya.

Oleh karena itu, berdasarkan sintesis literatur yang dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi penting yang dapat diajukan untuk memperkuat praktik akuntansi pemerintahan di Indonesia. Pertama, perlunya standarisasi teknik penjurnalan yang lebih operasional dengan disertai contoh-contoh kasus nyata untuk setiap jenis transaksi pemerintahan. Panduan teknis yang disusun secara kontekstual akan memudahkan aparat dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual secara konsisten. Kedua, pentingnya penguatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi aparat pengelola keuangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar pemahaman terhadap prinsip dan praktik akuntansi pemerintahan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif. Ketiga, percepatan integrasi sistem informasi akuntansi antarlembaga dan penguatan sistem keamanan data menjadi agenda strategis yang harus diutamakan oleh pemerintah guna memastikan kelangsungan proses digitalisasi yang aman dan efektif. Keempat, diperlukan kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan pemerintah dalam pengembangan modul-modul pembelajaran akuntansi pemerintahan berbasis studi kasus lokal yang lebih representatif terhadap kondisi lapangan.

Dengan mengacu pada temuan-temuan literatur yang telah disintesis secara sistematis, dapat disimpulkan bahwa praktik akuntansi pemerintahan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan serius, baik dari aspek teknis maupun struktural. Persamaan akuntansi dan teknik penjurnalan yang sudah ditetapkan belum sepenuhnya diimplementasikan secara merata, sementara teknologi informasi yang seharusnya

menjadi solusi, masih menghadapi berbagai kendala implementasi. Namun demikian, potensi perbaikan tetap terbuka lebar jika ada komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kapasitas, infrastruktur, serta tata kelola akuntansi pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan pendekatan sistematis seperti ini, penulisan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap literatur dan praktik akuntansi pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berdaya saing.

3. Kesimpulan

Praktik akuntansi pemerintahan di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang tinggi, terutama dalam penerapan persamaan akuntansi, teknik penjurnalan, dan pengelolaan transaksi pemerintahan. Meskipun telah tersedia standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang diatur secara nasional, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di tingkat daerah maupun pusat, seperti perbedaan interpretasi terhadap standar, keterbatasan SDM, dan infrastruktur teknologi yang belum merata. Teknik penjurnalan masih belum dipahami secara seragam oleh aparat pemerintah, sehingga menimbulkan risiko inkonsistensi pelaporan keuangan.

Temuan penting dalam penulisan ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman terhadap prinsip dasar persamaan akuntansi dan teknik penjurnalan sangat diperlukan. Selain itu, peran teknologi informasi terbukti strategis dalam mendukung keandalan dan efisiensi pencatatan transaksi serta dalam meminimalisasi kesalahan penjurnalan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM dan investasi pada sistem informasi akuntansi yang terintegrasi merupakan langkah esensial dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.

Penulisan ini memberikan kontribusi penting dalam mengisi kekosongan literatur mengenai integrasi antara teknik penjurnalan, tantangan pencatatan transaksi, dan solusi teknologi informasi di lingkungan akuntansi sektor publik Indonesia. Rekomendasi yang disampaikan diharapkan dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi untuk mengembangkan praktik akuntansi pemerintahan yang lebih akurat, efisien, dan terpercaya.

Referensi

- Abidin, A. U., & Ramadhan, I. (2019). Penerapan Job Safety Analysis, Pengetahuan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kejadian Kecelakaan Kerja Di Laboratorium Perguruan Tinggi. *Jurnal Berkala Kesehatan*, 5(2), 76. <https://doi.org/10.20527/Jbk.V5i2.7827>
- Akbar, R. (2018). Pengukuran Kinerja Dan Akuntabilitas Publik Di Indonesia Studi Awal Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Akuntabilitas Publik*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.22146/Jaap.35332>
- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/Jah.V6i1.4484>
- Animah, A., Suryantara, A. B., & Astuti, W. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 5(1), 99–109. <https://doi.org/10.29303/Jaa.V5i1.93>
- Asri Putri, T., & Herning Sitabuana, T. (2022). Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (Bumn). *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1003–1018. <https://doi.org/10.54443/Sibatik.V1i7.118>
- Hadiyat, Y. R. (2020). Sistem Informasi Akuntansi Manajemen, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Kinerja Manajerial. *Jrak*, 12(1), 37–42. <https://doi.org/10.23969/Jrak.V12i1.4058>
- Hairul Izam, O. (2024). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan. *Comserva : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(10), 3967–3975. <https://doi.org/10.59141/Comserva.V3i10.1200>
- Harahap, P. S., & Prabowo, T. J. W. (2023). Analisis Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Website Pemerintah Daerah.
- Mahmudah, H., & Ls, B. R. (2017). Keefektifan Audit Internal Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 20(1), 33. <https://doi.org/10.24912/Ja.V20i1.74>
- Nugrahanti, T. P., Puspitasari, N., & Andaningsih, I. R. (2023). Transformasi Praktik Akuntansi Melalui Teknologi: Peran Kecerdasan Buatan, Analisis Data, Dan Blockchain Dalam Otomatisasi Proses Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science*, 2(03), 213–221. <https://doi.org/10.58812/Jakws.V2i03.644>
- Putra, S., Ranidiah, F., & Yulinda, A. T. (2020). Pengaruh Point Of Purchase (Pop) Terhadap Keputusan Pembelian Produk Pakaian Di Pt. Matahari Department Store Kota Bengkulu. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 192–204. <https://doi.org/10.37676/Ekombis.V8i2.1085>
- Rachmawati, R. (2020). *Pengenalan Metode Systematic Literature Review (Slr)*.
- Rahmawati, E., Sonita, S., Wahyu Nur Kholid, A., & Sofyani, H. (2022). Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:

Peran Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemediasi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 346–359. <https://doi.org/10.22219/Jrak.V12i2.21791>

Saputra, D. F. (2023). *Literasi Digital Untuk Perlindungan Data Pribadi*. 17.

Silalahi, A. D., & Maullang, M. (2023). Pentingnya Akuntansi Sektor Publik Di Institusi Pemerintahan. *All Fields Of Science Journal Liaison Academia And Society*, 3(2), 192–199. <https://doi.org/10.58939/Afosj-Las.V3i2.592>

Syachbrani, W. (2024). *Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*.

W., H. S. (2009). Konvergensi Standar Laporan Keuangan Ke Standar Pelaporan Keuangan Internasional, Apa Dan Bagaimana. *The Winners*, 10(1), 10. <https://doi.org/10.21512/Tw.V10i1.712>

Waruwu, M. (2024). Metode Penelitian Dan Pengembangan (R&D): Konsep, Jenis, Tahapan Dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2), 1220–1230. <https://doi.org/10.29303/Jipp.V9i2.2141>

Welly, W., Dewi, C., Djuniar, L., Zuraidah, I., & Sabrina, N. (2023). Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 8(2), 150. <https://doi.org/10.32502/jab.v8i2.6977>